Pemasaran Obat Dalam Usaha Farmasi: Persoalan Profesionalisme dan Etika Bisnis

Neneng Putri Siti Nurhayati, Gusti Mashafira Berlia, Faiq Fikrilyan Sasongko, Elvira Valentine, Universitas Pasundan, valentineelvira@gmail.com

ABSTRACT: Since the Covid-19 pandemic declined, cases of kidney failure in children in Indonesia have been increasing from time to time. The government has concluded that the cases of kidney failure that have befallen hundreds of children in Indonesia are the result of syrup drugs containing ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG). The ban on the use of syrup is a very dilemmatic decision for mothers in Indonesia. Given that children cannot yet swallow tablets or capsules, the government is advised to recommend drugs that are safe for use for children that do not cause acute kidney failure. The purpose of this research is to find out the issues of professionalism and business ethics in drug marketing and to add a moral burden to increase the degree of society. The research method that researchers use is descriptive analysis method using literature study as material for this research. Drug marketing does not only think about how the company's drugs or products are sold, but the pharmaceutical industry must also create a sense of security and consumer confidence in the products being sold. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia (KEMENKES RI) appealed directly to the public to stop using syrup on children and asked pharmacists and other health workers not to prescribe syrup for the time being. Ethics and professionalism are needed in drug marketing efforts to prevent marketing practices that are not up to standard which can later lead to unfair competition and can be detrimental to consumers. The results of our research found that pharmaceutical companies have not fully implemented business ethics and professionalism regarding drug marketing so that this can harm other people causing kidney failure in their consumers.

KEYWORDS: syrup medicine, kidney failure, ethics, professionalism, business

ABSTRAK: Semenjak pandemi Covid-19 menurun, ditemukan kasus gagal ginjal pada anak di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah telah menyimpulkan, bahwa kasus gagal ginjal yang menimpa pada ratusan anak di Indonesia ini merupakan akibat dari obat sirup yang mengandung Etilen glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Larangan penggunaan obat sirup merupakan keputusan yang sangat dilematis untuk para ibu di Indonesia. Mengingat bahwa anak-anak belum bisa menelan obat tablet atau kapsul, sehingga pemerintah disarankan untuk merekomendasikan obat-obat yang aman dipakai untuk anak-anak yang tidak menyebabkan gagal ginjal akut. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui persoalan profesionalisme dan etika bisnis dalam pemasaran obat dan menambahkan beban moral untuk meningkatkan derajat masyarakat. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode deskriptif analisis dengan menggunakan studi pustaka sebagai bahan penelitian ini. Pemasaran obat tidak hanya memikirkan bagaimana obat atau produk perusahaan dijual, tetapi industri

farmasi juga harus menciptakan rasa aman dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) mengimbau masyarakat secara langsung untuk menghentikan penggunaan sirup pada anak-anak dan meminta apoteker dan tenaga kesehatan lainnya untuk tidak meresepkan sirup untuk sementara. Etika dan profesionalisme sangat diperlukan dalam usaha pemasaran obat untuk mencegah praktik pemasaran yang tidak sesuai standar yang nantinya dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat merugikan bagi konsumen. Hasil dari penelitian yang kami temukan bahwa perusahaan farmasi belum sepenuhnya mengimplementasikan etika dan profesionalisme bisnis terkait pemasaran obat sehingga hal tersebut dapat merugikan orang lain yang menyebabkan gagal ginjal pada konsumennya.

KATA KUNCI: obat sirup, gagal ginjal, etika, professionalisme, bisnis

I. PENDAHULUAN

Usaha farmasi atau perusahaan obat yaitu perusahaan komersial yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan distribusi obat-obatan, khususnya di bidang kesehatan. Perusahaan farmasi dapat beroperasi secara efektif apabila volume penjualan terus berlanjut dan meningkat. Penjualan usaha farmasi juga harus memenuhi hak-hak Marketing dan sales terlebih lagi persaingan usaha yang semakin ketat antara usaha farmasi, para pelaku usaha juga harus meningkatkan pembinaan terhadapnya agar pelayanannya maksimal. (Eva Sundari, 2022). Perusahaan farmasi merupakan industri yang banyak memanfaatkan modal intelektual. Pasar industri farmasi Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial mengingat tingginya jumlah penduduk di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 220 (dua ratus dua puluh) juta orang. Sebagai bagian dari usahanya, perusahaan farmasi menghasilkan produk berupa obat-obatan. (Reysita Mayasani, 2015)

Obat juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat digantikan oleh pelayanan kesehatan. Pedagang Besar Farmasi (PBF) selalu terlibat dalam rantai distribusi farmasi. Keputusan Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa Pedagang Besar Farmasi atau disingkat PBF adalah perusahaan yang berbadan hukum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh, menyimpan, dan mendistribusikan obat-obatan dalam jumlah besar. (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bab 1, Pasal 1, 2011).

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah pimpinan lembaga non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan serta pengendalian obat dan makanan. Merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 tahun 2002 tentang Pembinaan Obat, Penanaman Modal Industri Farmasi Nasional (PMDN) yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi Indonesia), telah menerbitkan Kode Etik

Pemasaran Komersial Farmasi Indonesia untuk Ethical Product. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempertahankan bisnis yang menguntungkan dengan persaingan yang sehat, sehingga dunia farmasi Indonesia dapat berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dengan itu, masyarakat perlu memperoleh kepastian yang menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat. Meskipun sudah ada peraturan menegnai kode etik tentang pemasaran dan promosi obat, namun faktanya setelah virus Covid-19 menurun, kasus gagal ginjal pada anak ditemukan meningkat dari waktu ke waktu.

Pada akhir Agustus 2022, banyak laporan Atypical/Progressive Acute Kidney Injury (AKI) pada anak terutama di bawah usia 5 tahun ke Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang masih terus meningkat hingga saat ini mencapai 241 anak yang menjadi korban gagal ginjal. Awalnya kasus ini ditemukan di DKI Jakarta lalu disusul dengan Jawa Barat dimana ditemukan kelebihan kandungan pada obat sirup tersebut sehingga menyebabkan gagal ginjal pada anak. Saat ini, obat sirup untuk anak mulai ditarik dari peredaran karena BPOM telah mengidentifikasi sampel bahan kimia CV Samudra Chemical Tapos yang telah diuji di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 sampel propilen glikol yang diambil sampelnya mengandung EG sebesar 4,69-99,09%, sedangkan 2 sampel tidak terdeteksi adanya EG. Hasil pengujian sampel bahan baku sorbitol sampel lapangan juga mengandung EG dan DEG sebesar 0,03-1,34%. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020)

Dikutip dari Tribun Jogja.com, bahwa pemerintah telah menyimpulkan terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada ratusan anak-anak di Indonesia diakibatkan karena keracunan obat sirup yang tercemar dari Etilen glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Pernyataan tersebut diperoleh dari Kementrian Kesehatan bersama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, yang telah melakukan penelitian lebih mendalam terkait kasus ini bahwa kasus ini terjadi pada akhir bulan Agustus yang terjauid peningkatan pada bulan September dan bulan Oktober, tetapi menurut Syahril kasus ini sudah tidak terjadi lagi setelah

dua pekan sejak PERMENKES melarang penggunaan obat sirup tepatnya pada 18 Oktober. Selanjutnya pada tanggal 23 bulan Oktober, Kementerian Kesehatan melakukan kerja sama dengan BPOM untuk melakukan penelitian obat yang disarankan kepada anak dan menetapkan obat penawar Fomepizole untuk gagal ginjal. Adanya kebijakan penetapan pelanggaran tersebut, alhasil tidak terjadi penambahan terhadap kasus ini. Akibat dari adanya pelanggaran tersebut, BPOM langsung menarik dan memusnahkan setiap produksi obat sirup dari PT Samco Farma dan PT Ciubros Farma. Pemusnahan itu dilakukan terhadap seluruh obat sirup yang mengandung pelarut tambahan EG dan DEG yang melebihi ambang batas dan dimusnahkan juga ditarik dari peredaran, kasus gagal ginjal pada anak menjadi berkurang hingga 15 November 2022 dan diikuti jumlah pasien yang meninggal tidak bertambah lagi sejak saat itu. Menurut Guru Besar dari bidang Farmakologi dan Farmasi Klinis Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yaitu Zullies Ikawati menilai bahwa keputusan terkait larangan penggunaan obat sirup tersebut merupakan keputusan yang sangat dilematis untuk para ibu di Indonesia mengingat bahwa anak-anak belum bisa menelan obat tablet atau kapsul sehingga pemerintah disarankan untuk merekomendasikan obat-obat yang aman dipakai untuk anak-anak yang tidak menyebabkan gagal ginjal akut. Melihat keputusan Kemenkes yang melarang untuk seluruh obat dalam bentuk cair atau sirup dikonsumsi oleh anak, menurutnya Kemenkes juga harus mempertimbangkan resiko dan manfaat pasalnya bisa saja kemungkinan adanya cemaran yang bisa membahayakan bisa saja dari faktor makanan dan minuman atau yang lainnya. (Susmayanti, 2022)

Pemerintah juga seharusnya membuat daftar obat sirup yang aman dikonsumsi oleh anak-anak karena anak-anak belum bisa mengkonsumsi obat tablet atau kapsul, oleh karenanya dengan adanya keputusan Kemenkes ini seharusnya Kemenkes memikirkan alternatif atau jalan keluar untuk dapat memberikan solusi terhadap kasus ini. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan bahwa bahan baku yang terkandung dalam sirup obat anak ini mengandung bahan yang merugikan konsumen, sehingga hal ini bertentangan dengan profesionalisme dan etika dalam industri pemasaran farmasi di industri farmasi.

II. METODE

Metode penelitian yang akan dipakai adalah Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metodologi analisis yang dilakukan melalui pendeskripsian atau penggambaran suatu hasil data yang sudah dikumpulkan secara apa adanya dengan tanpa menyimpulkan hasilnya secara umum atau melakukan generalisasi. Adapun analisis deskriptif mempunyai ciri yaitu pada hasil sajian datanya menekankan pada hasil pengukuran statistik di mana terdiri atas tabel, grafik, seperti tingkat persentase, rata-rata, variansi, korelasi, serta angka indeks. Namun, pada analisis deskriptif tanpa melalui proses uji signifikansi serta pengukuran kesalahan dikarenakan tidak adanya kesalahan secara umum atau general. (Purwanto Agus, 2007) Dengan menggunakan penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat efektif dalam proses pengumpulan data secara sistematis, kemudian melakukan kategorisasi untuk mengurutkan data, lalu melakukan analisis secara deskriptif dalam hal interpretasi terhadap data yang telah didapatkan melalui metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Data-data tersebut juga dapat berbentuk rangkaian kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat, serta sejenisnya (Abdul Manab, 2015)

Pada tahapan ini, penelitian berfokus untuk menentukan landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti sehingga penelitian tidak menjadi suatu kegiatan yang didasari oleh percobaan-percobaan semata, melainkan dapat menjadi hal yang penting karena studi literatur kepustakaan adalah hal yang sangat penting dan mencakup setengah dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari studi literatur kepustakaan sendiri adalah untuk menemukan atau memperlihatkan hasil sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan pada penelitian yang sedang dilakukan. Jika hasil penelitian ditemukan dalam penelitian lain yang telah ada, peneliti dapat mencoba menggali secara mendalam mengenai penelitian dengan topik yang sama. (Sunggono, 2015). Secara sederhana studi literatur kepustakaan ini bisa memberikan kelebihan seperti:

1. Memperoleh gambaran terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

2. Menjadi referensi bagi peneliti dalam menentukan metodologi, teknik, maupun cara dalam meneliti permasalahan.
3. Menjadi sumber data sekunder bagi peneliti.
4. Mendapatkan informasi mengenai latar belakang historis permasalahan yang hendak diteliti.
5. Memperoleh referensi mengenai beberapa cara dalam mengevaluasi atau menganalisis data penelitian.
6. Menjadi sumber ide baru bagi peneliti.
7. Mendapatkan informasi terkait siapa saja peneliti dan pengguna hasil penelitian dalam bidang yang sedang diteliti.

III. HASIL

Hasil penelitian yang kami temukan bahwa tindakan yang dilakukan CV Samudera Chemical Tapos Depok dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan terbukti telah menggunakan zat pelarut Ethylene Glycol (EG) dan Diethylene Glycol (DEG) diluar ambang batas yang sesuai dengan prosedurnya yaitu 0,1 milligram/milliliter. (Aritha Eshter Taringan, Ralang Hartati, Syafrida, 2022).

Dalam hal ini, Pelaku usaha farmasi seharusnya dapat menerapkan profesionalisme dalam usahanya dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan kesehatan bagi masyarakat. Terkait dengan kasus yang menyebabkan gagal ginjal pada anak dan semestinya pelaku usaha melakukan itikad baik kepada masyarakat luas sebagai bentuk profesionalisme mereka dalam menjaga nama baik perusahaan dan juga bukan hanya perusahaannya saja yang harus bertanggung jawab tetapi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Kesehatan yang memiliki andil dalam mengedarkan obat-obatan juga sepatutnya memperkuat fungsi pengawasan kelapangan bukan hanya menerima data dari perusahaan yang akan mendaftarkan

obatnya saja. Menurut penulis, kasus gagal ginjal ini terjadi karena lemahnya fungsi dari pengawasan dalam memberikan izin edar terhadap obat dan masih banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam memberikan takaran. Maka dari itu, diperlukannya pengawasan keamanan karena pengawasan keamanan ini tidak terlepas dari kejadian yang mengakibatkan kematian pada anak yang disebabkan oleh obat sirup. Fungsi otoritas dibutuhkan agar industri farmasi dapat menjamin kualitas dari obat yang akan diproduksi oleh industri farmasi tersebut lolos dari pengawasan keamanan dan taraf industri farmasi di Indonesia telah diatur di dalam tata Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang dibentuk oleh BPOM. CPOB yaitu regulasi untuk dapat memastikan bahwa setiap obat yang akan diproduksi oleh industri farmasi dapat dilakukan dengan berkelanjutan dan juga harus diawasi sesuai dengan standar yang ada, sehingga dapat meminimalkan resiko yang ada. Pengawasan ini merupakan fungsi yang sangat fundamental dan harus dilakukan oleh setiap industri farmasi di Indonesia.

Tingkat pengawasan dapat diatur agar setiap bahan yang digunakan, disuplai dan dipasarkan memenuhi standar kualitas dan mutu, memenuhi persyaratan label dan memenuhi semua aspek hukum. Kegiatan ini meliputi pengambilan sampel, pengujian dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, mendokumentasikan setiap kegiatan dan melakukan prosedur untuk memungkinkan bahan berpindah ke tahap berikutnya. Maka dari itu, seluruh produk tersebut seharusnya sudah melewati tahap pemeriksaan atau proses peninjauan produk (screening). Pada tahap ini juga bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengambil keputusan pelulusan produk akhir sebelum diedarkan. Dalam hal ini, CPOB yang dibentuk oleh BPOM lalai dalam memeriksa dan bekerja tidak sesuai dengan fungsinya. Etika bisnis pada perusahaan seharusnya mengacu pada pedoman tata kelola yang baik dengan adanya transparansi dapat menghasilkan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam menyampaikan keterangan mengenai kasus obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal pada anak ini tidak terdapat proses transparansi dari perusahaan farmasi tentang komposisi yang terkandung. Lalu juga perusahaan seharusnya mempunyai akuntabilitas

agar dapat mencapai hasil yang terbaik bagi seluruh pihak yang berkepentingan melalui kejelasan fungsi dan cara mereka dapat mempertanggungjawabkannya. Lalu juga setiap perusahaan wajib berkomitmen untuk mematuhi terhadap etika bisnis agar tanggung jawab tersebut dapat tersampaikan dan diimplementasikan oleh perusahaan, lalu juga seharusnya setiap perusahaan terdapat Manajemen Senior yang dapat memantau penerapan etika bisnis di perusahaan tersebut jadi ketika adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran etika maka setiap perusahaan tersebut wajib menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor. (Novia Sarwoning Tyas, 2020).

Melihat kasus tersebut, sudah seharusnya pelaku pemasaran obat dapat memberikan informasi yang benar, jelas kadar atau takarannya dan jujur mengenai kondisi dan dapat menjamin barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan juga diharapkan dapat memberi ganti kerugian apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sayangnya, pelaku usaha dalam kasus ini tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan tersebut dalam memproduksi obat yang sesuai dengan standar mutu dan menjadi membahayakan kesehatan bagi konsumen yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai “perbuatan bagi pelaku usaha yang dilarang untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

IV. PEMBAHASAN

A. Penilaian Masyarakat Terhadap Kasus Gagal Ginjal

Berawal dari kasus obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal pada seorang anak yang diduga mengandung bahan berbahaya di dalamnya sehingga menyebabkan gagal ginjal dan juga terdapat beberapa dampak dari obat tersebut yang salah satunya menyebabkan kematian seorang bayi. Seperti dikutip Fimela.com 2022, Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia (KEMENKES RI) menghimbau masyarakat secara langsung untuk menghentikan penggunaan sirup pada anak-anak dan meminta apoteker serta tenaga kesehatan lainnya untuk tidak meresepkan sirup untuk sementara. Masyarakat menilai, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) “kehilangan” terkait pengawasan obat sirup. Berdasarkan temuan tersebut, BPOM menilai telah terjadi pelanggaran oleh perusahaan farmasi yang mengganti bahan baku dengan menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dengan cemaran zat Ethylene Glycol (EG) dan Diethylene Glycol (DEG) di atas ambang batas aman, sehingga membuat produk ketiga industri Farmasi tidak memenuhi persyaratan.(Fimela, 2022). Alhasil, masyarakat menjadi khawatir terutama para orang tua enggan memberikan obat sirup kepada anak-anaknya. Masyarakat juga menimbang, seharusnya Kementerian Kesehatan mengambil tindakan untuk menarik atau mengambil izin edar obat sirup yang memiliki kandungan berbahaya dari masyarakat karena masyarakat merasa dikecewakan oleh pelaku usaha dan pemerintah yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Seharusnya perusahaan farmasi menjaga keselamatan konsumen sesuai dengan norma hukum yang berlaku yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4a yang menjelaskan bahwa “hak konsumen meliputi hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.” Jika dikaitkan antara Pasal 4a dengan fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat merasa tidak diberikan hak atas keselamatan untuk dirinya dan juga telah mencederai etika serta profesionalisme dalam bidang bisnis pemasaran.

Fakta ini membuat masyarakat merasa ditipu oleh perusahaan farmasi dan juga menghilangkan kepercayaan masyarakat untuk membeli obat sirup. Perusahaan harus mampu mencapai tujuan profesionalisme dengan menjaga kepercayaan masyarakat dan menghasilkan produk berkualitas yang menjamin keamanan bagi kesehatan masyarakat. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha atau perusahaan akan mementingkan keuntungan atau profitnya (profit oriented). Disamping hal itu, perusahaan juga harus mengedepankan

keselamatan bagi pengguna produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini menjadi masalah dan timbulnya penilaian dari masyarakat terhadap etika bisnis dalam memasarkan obat yang dikarenakan etika bisnis pemasarannya kurang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Menurut pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa, obat sirup tersebut sudah lama beredar di masyarakat tetapi baru-baru ini terjadi kasus yang menyebabkan gagal ginjal pada anak. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh BPOM yang disampaikan melalui siaran pers, ditemukan adanya pemasok Glikol dari CV Samudera Chemical Tapos Depok yang terbukti melanggar persyaratan farmasi. Berdasarkan adanya pelanggaran tersebut, BPOM menarik izin edar dari perusahaan tersebut dan memusnahkan obat sirup yang diproduksi perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut menggunakan bahan zat pelarut yang penggunaannya melebihi batas yang seharusnya dianjurkan.

B. Pelanggaran Pemasaran Perusahaan Obat.

Pemasaran obat tidak hanya memikirkan bagaimana obat atau produk perusahaan dijual, tetapi industri farmasi juga harus menciptakan rasa aman dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijualnya. Oleh karena itu, etika dan profesionalisme sangat diperlukan dalam usaha pemasaran obat untuk mengantisipasi praktik pemasaran obat yang tidak sesuai standar yang nantinya akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan pembeli. Tujuan utama etika dan profesionalisme adalah memajukan industri farmasi agar dapat bertanggung jawab dan memberikan beban moral untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kasus kelalaian farmasi yang menyebabkan gagal ginjal pada anak telah terbukti melanggar etika dalam bisnis karena yang seharusnya menyuplai bahan baku industri farmasi adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF). Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa prosedur tersebut seharusnya dilaksanakan untuk menyuplai bahan baku industri farmasi bukan dari CV Samudera Chemical Tapos Depok. Nyatanya, CV Samudera Chemical Tapos

terbukti menjadi pemasok Propilen Glikol. Oleh sebab itu, perusahaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat farmasi dan telah melanggar etika dalam pemasaran bisnis obat dalam perusahaan.

C. Etika dan Profesionalisme Perusahaan Obat Dalam Bisnis Pemasaran Obat.

Etika dapat dikatakan sebagai filsafat moral dimana etika tidak dapat langsung memberikan mandat yang konkrit sebagai panduan atau batasan yang langsung dapat diimplementasikan. Etika dapat diurakan menjadi sebuah cara berpikir yang rasional terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berhubungan dengan bagaimana cara manusia dalam menjalani hidup yang baik sebagaimana manusia pada semestinya dan mampu menjadikan permasalahan-permasalahan yang ada pada kehidupan manusia dengan berlandaskan pada nilai dan norma moral agar dapat diterima oleh masyarakat. Adapun maksud dari norma moral adalah sebuah ketentuan atau nilai-nilai di suatu lingkungan atau masyarakat terhadap sikap serta perilaku manusia sebagai manusia yang semestinya. Norma ini juga berkaitan erat dengan aturan-aturan mengenai baik dan buruknya, adil atau tidaknya suatu tindakan, dan perilaku manusia sebagai manusia yang semestinya. Norma moral ini juga diimplementasikan menjadi sebuah pedoman bagi setiap lingkungan atau masyarakat dalam menentukan baik dan buruknya suatu perilaku individu kepada individu lain sebagaimana dirinya menjalankan fungsi atau jabatannya dalam masyarakat. (Endang Pamuji, 2020)

Zimmerer dikutip dari Michael Josephson. Menurut Michael Josephson, terdapat beberapa prinsip secara umum pada etika yang dapat mengarahkan prinsip perilaku seorang individu (Thomas W. Zimmerer, 2009), sebagai berikut :

1. Kejujuran, yaitu memegang penuh suatu kepercayaan, tidak melakukan kecurangan, dan tidak berbohong kepada individu lain;
2. Berintegritas, yaitu selalu memegang prinsip dengan cara melakukan kegiatan yang terhormat;

3. Menepati perkataannya, selalu menepati janji, dapat dipercaya, dan penuh komitmen;
4. Kesetiaan, hormat selalu, dan royal kepada keluarga, teman, karyawan dan Negara;
5. Kewajaran atau keadilan, dapat berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengaku dan memperlihatkan komitmen keadilan;
6. Membantu orang lain, berbelas kasihan, dan tolong menolong;
7. Menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain, menghargai kebebasan dan hak individu;
8. Warga negara yang dapat bertanggung jawab, patuh terhadap hukum atau aturan yang ada di masyarakat, penuh kesadaran sosial, menghormati proses demokrasi dalam pengambilan keputusan;
9. Mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan yang baik dalam pertemuan individu maupun dapat mempertanggungjawabkan secara profesional, tekun dapat dipercaya atau diandalkan, rajin dan penuh komitmen, melakukan semua tugas dengan baik berdasarkan kemampuan dalam mengembangkan dan dapat mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi, dan
10. Dapat dipertanggung jawabkan, yaitu memiliki rasa tanggung jawab untuk menerima sebuah keputusan dan selalu siap dengan konsekuensinya dan dapat menjadi contoh atau teladan.

Berdasarkan prinsip etika, semestinya perusahaan farmasi dapat menerapkannya. Terlebih lagi dengan adanya kasus gagal ginjal tersebut perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dilihat dari prinsip etika bisnis, perusahaan seharusnya dapat mengutamakan kejujuran terkait dengan komposisi kandungan yang

terdapat dalam obat dan juga seharusnya perusahaan tersebut mentaati hukum atau aturan dilandaskan pada kesadaran diri dalam mengambil suatu keputusan. Etika bisnis yaitu pedoman untuk melakukan kegiatan berbisnis juga meliputi seluruh nilai yang dimulai dari individu hingga masyarakat. Etika dalam bisnis diharapkan bisa menjadi standar dalam menjalankan pekerjaan dan pegangan yang dimulai dari pimpinan hingga karyawan untuk dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari karena jika hanya mengandalkan berbisnis tidak akan cukup karena pekerjaan hanya mengandalkan kecerdasan, keterampilan atau keahlian teknis saja. Kemudian yang menjadi dasar prioritas yaitu bagaimana caranya untuk membangun nilai moral terlebih dahulu karena bisnis mempunyai prinsip yang baik yaitu mereka dapat menjalankan bisnis dengan memiliki etika, yaitu dijalankan sesuai dengan nilai-nilai yang sejalan dengan aturan atau norma hukum yang ada. Sesuai pada prinsipnya, etika bisnis sangat menuntut kejujuran kepada para pihak dalam pemutusan hubungan kerjasama dan dalam menyepakati suatu perjanjian kerja. Jika tidak ada kejujuran dan apabila terjadi kecurangan yang telah dilakukan oleh pelaku pemasaran, maka akan timbul rasa tidak percaya sehingga pihak lain tidak akan mau bekerja sama lagi. (Rahma, 2017).

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa perusahaan farmasi belum sepenuhnya memenuhi etika dan profesional sepatutnya dalam bisnis pemasaran obat yang mana tindakan yang dilakukan perusahaan mengakibatkan kerugian dan menghilangkan rasa kepercayaan bagi masyarakat luas. Pentingnya suatu badan hukum menerapkan etika dan profesionalisme agar tidak memberikan dampak negatif bagi orang lain atau masyarakat sekitar. Etika dan profesionalisme ini merupakan kesadaran berkenaan dengan nilai serta tanggung jawab yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh diri sendiri.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Manab. (2015). Penelitian Pendidikan Pendektan Kualitatif. In *kalimedia*.

Aritha Eshter Taringan, Ralang Hartati, Syafrida, E. A. (2022). TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA MEMPRODUKSI OBAT SIRUP CAIR MENIMBULKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK. *Jurnal Surya Kencana Dua*.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3095239>

Endang Pamuji. (2020). ETIKA BISNIS PADA PT. SI. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*.

Eva Sundari, H. (2022). Strategi Pemasaran Usaha Produk Farmasi Masa Pandemi Covid 19 Di PT. Ferron Par Pharmaceutical (Studi Kasus Peningkatan Volume Penjualan Produk Farmasi). *Universitas Islam Riau*.

Fimela. (2022). Keracunan Obat Menjadi Penyebab Pasti Gagal Ginjal Akut di Indonesia. *www.Fimela.com*.
<https://www.fimela.com/health/read/5116730/keracunan-obat-menjadi-penyebab-pasti-gagal-ginjal-akut-di-indonesia>

Novia Sarwoning Tyas. (2020). ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA PT PERUSAHAAN FARMASI X. *Universitas Mercu Buana*.

Purwanto Agus. (2007). *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Grasindo.

Rahma, N. (2017). BAB II ETIKA BISNIS. *Universitas Darma Persada*. [http://repository.unsada.ac.id/525/3/BAB II ETIKA BISNIS.pdf](http://repository.unsada.ac.id/525/3/BAB%20II%20ETIKA%20BISNIS.pdf)

Reysita Mayasani. (2015). PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP ECONOMIC VALUE ADDED PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009 – 2013. *ejournal.unesa.ac.id*.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020). Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Meningkat, Kemenkes Minta Orang Tua Waspada. *setkab.go.id*.

Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*.

Susmayanti, H. (2022). Kesimpulan Hasil Penelitian Gagal Ginjal Akut: Dipicu Keracunan Obat Sirup yang Tercemar EG dan DEG. *TribunJogja.com*.

Thomas W. Zimmerer. (2009). *Etika Bisnis Dalam Kewirausahaan*.